

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN
PERMASALAHAN NARKOBA DI WILAYAH
JAWA TENGAH**

Oleh:

M. Tha'at Amrullah, Nina Widowati
**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email : amrullahmuhammadthaat@gmail.com

ABSTRACT

The drug problem in Central Java is handled by the Central Java Provincial National Narcotics Agency (BNNP) through the Community Prevention and Empowerment Sector (P2M) with various preventive measures, such as: dissemination of information, advocacy, socializing drugs, empowering community participation (PSM) and empowering alternatives. (PA), as well as other supporting activities. The research method used by the author in this study is a qualitative method, which includes several aspects, namely: goal achievement, integration, and adaptation. The informants chosen by the authors in this study are : the Head of the Community Prevention and Empowerment Division, the Head of the Prevention Section, and the Head of the Community Empowerment Section.

The results showed that the Effectiveness of the Prevention and Community Empowerment Sector was quite effective, although not optimal. The effectiveness of P2M can be seen from the aspects of effectiveness, namely: goal achievement, integration, and adaptation. Some of the obstacles faced are: P2M field human resources which are still lacking and limited to cover the entire area of Central Java which is so wide, the lack of a prevention fleet in the form of urine test trucks and drug prevention cars, and the annual budget that is obtained is insufficient to carry out a work design existing, causing the prevention and community empowerment process to not run optimally.

It is recommended that the Community Prevention and Empowerment Sector be more innovative and active by conducting socialization through other media, such as: magazines, radio, regional television, or websites belonging to provincial offices, seeking and collaborating with relevant stakeholders as an effort to suppress the existing budget, and evaluate the results of the performance taken so that the steps in the Prevention and Community Empowerment Sector in the future can be better and optimal.

Keywords: Effectiveness, Aspects of Effectiveness, Drugs.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkoba tidak hanya menjadi permasalahan ditingkat nasional, di berbagai daerah provinsi besar di Indonesia masalah narkoba juga menjadi isu hangat salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi besar di Jawa diapit oleh 2 provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur serta satu provinsi Istimewa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jawa Tengah juga dibatasi langsung dengan laut dimana sebelah utara dengan Laut Jawa, dan sebelah selatan dengan Samudera Hindia, hal ini disinyalir merupakan wilayah kerawanan peredaran gelap narkoba.

Situasi narkoba di Jawa Tengah :

1. Jumlah narkoba di Jawa Tengah mencapai lebih dari 300.000 jiwa (1,16%).
2. 59% berstatus sebagai pekerja.
3. 24% masih berstatus pelajar/mahasiswa.
4. 17% adalah pengangguran (sumber : Puslitdatin BNN bekerja sama dengan Puslitkes UI Tahun 2017)
5. Hasil ungkap kasus oleh BNNP Jateng di tahun 2018 sudah lebih dari 10,3 kg sabu.
6. Hasil ungkap kasus oleh BNNP Jateng tahun 2019 sejumlah 3,874 kg sabu, ganja 5,943 kg dan ekstasi 257 butir. **sumber : BNNP Jateng**

BNNP Jateng melalui Bidang P2M mencoba untuk menyadarkan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti: diseminasi informasi, advokasi, sosialisasi narkoba, pendekatan-pendekatan langsung ke masyarakat melalui pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (PSM) dan Pemberdayaan Alternatif (PA), serta kegiatan penunjang yang lainnya.

Sasaran Umum dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) adalah untuk menuju terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan

narkoba hingga angka 0,05% di wilayah provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai hal ini Bidang P2M mempunyai 2 tujuan program yakni :

1. Pencegahan untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas).
2. Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

Salah satu ujung tombak yang paling penting dalam rangka memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Agenda yang dilakukan oleh Bidang P2M adalah :

1. Menambah penggiat anti narkoba dan memberdayakannya
2. Deteksi Dini Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Tes Uji Narkotika dengan tes urine baik atas permintaan sendiri (mandiri) maupun atas inisiatif BNN Provinsi Jawa Tengah (DIPA APBN).

Tabel 1.1

Penggiat Anti Narkoba yang Diberdayakan

| Tahun | Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Pemerintah | Swasta | Pendidikan | Masyarakat |
| 2018 | 9 instansi (40 orang) | 10 instansi (40 orang) | 10 instansi (40 orang) | 10 instansi (30 orang) |
| 2019 | 8 instansi (30 orang) | (Belum) | (Belum) | (Belum) |

Sumber : Bidang P2M BNNP Jateng Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, proses pemberdayaan untuk penggiat/satgas anti narkoba di wilayah Jawa Tengah mengalami kendala, yakni terjadi penurunan pada penggiat anti narkoba di instansi pemerintah dari semula berjumlah 40 orang dari 9 instansi pemerintah pada tahun 2018, turun menjadi 30 orang dari 8 instansi, ada penurunan sebanyak 10 orang penggiat dan 1 instansi pemerintah pada tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2019, pada instansi swasta, instansi pendidikan, maupun instansi masyarakat yang belum dilakukan proses pemberdayaan untuk penggiat/satgas anti narkoba sama sekali. pada tahun 2019. Hal ini menjadi PR besar dan harus dievaluasi oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jateng.

Tabel 1.2
Tes Urine Kurun Waktu 2018-2019

| Tahun | Tes Urine | | |
|-------|----------------|--------------------------------------|--|
| | Secara Mandiri | DIPA APBN BNNP JATENG | DIPA APBN BNN |
| 2018 | 8.327 orang | 152 orang | 500 orang |
| 2019 | 1.958 orang | (tersedia alat sejumlah 148 buah) | (Tahun ini tidak/belum ada alokasi alat/anggaran dari BNN RI |

Sumber : Bidang P2M BNNP Jateng Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan tes urine yang dilakukan secara mandiri dari total 8.327 orang pada tahun 2018 menjadi hanya 1.958 orang saja pada tahun 2019. Ada penurunan sebanyak 6.369 orang yang tidak melakukan tes urine secara mandiri, disamping itu ada kendala lain yakni belum turunnya anggaran dari BNN RI sehingga menghambat proses tes urine yang dilakukan pada tahun 2019.

Tes urine secara mandiri adalah tes urine yang dibiayai oleh masing-masing orang, lembaga, atau dinas instansi baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal sesuai dengan kebutuhannya. Padahal tes urine merupakan langkah antisipatif pertama untuk bisa mengetahui apakah seseorang mengkonsumsi dan menjadi penyalahguna narkoba jenis tertentu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk Bidang P2M BNNP Jateng.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan 39 output kegiatan Diseminasi Informasi dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Diseminasi tatap muka di Auditorium RRI Semarang Tahun 2018.
2. *Talkshow* dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) bersama Kabid P2M BNN Provinsi Jawa Tengah di TVKU Semarang.
3. Senam sehat anti narkoba dalam rangka peringatan HANI 2019.
4. *Video statement* Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dalam rangka HANI 2019.
5. Diseminasi luar ruang tahun 2018 di jembatan jalan tol Semarang-Bawen tahun 2018.
6. Diseminasi informasi melalui media cetak Tribun Jateng.
7. Diseminasi informasi melalui media online di Tribunjateng.com tahun 2018.

8. Advokasi sebanyak 46 institusi pada tahun 2018. (**Sumber:Bidang P2M**).

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan permasalahan narkoba di Jawa Tengah, adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Bidang P2M BNNP Jateng, diantaranya :

1. Pelatihan Servis AC di Kelurahan Kuningan tahun 2018
2. Pelatihan membuat di Kelurahan Kuningan tahun 2019, **Sumber : Bidang P2M**.

Berdasarkan hal tersebut dan bagaimana untuk mengetahui permasalahan yang terjadi secara mendalam, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul : “Efektivitas Pencegahan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Permasalahan Narkoba Di Wilayah Jawa Tengah”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam mencegah ancaman penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah?
2. Apa saja aspek-aspek yang mendukung dan menghambat dari efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jateng?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menganalisis Efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam penanganan pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang mendukung dan menghambat efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

D. TEORI

1. Efektivitas

Schein (1980) dalam bukunya *organizational psychology* mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri tumbuh, lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya (Uha, 2013:187).

Efektivitas organisasi adalah pengertian tujuan dan pencapaian tujuan. Individu dianggap menggabungkan diri dalam organisasi dengan maksud mencapai tujuan pribadi mereka (seperti : penghasilan, status, dan pekerjaan yang berarti) secara lebih baik. Demikian pula organisasi dipandang sebagai kesatuan mengejar sasaran khusus keseluruhan organisasi (misalnya : laba, pertumbuhan, dan produktivitas).

Etzioni (dalam Torang, 2014:99) menggambarkan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam Sutopo (2012:51) keefektifan organisasi adalah ketepatan sasaran suatu proses yang terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerja sama dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai tujuan.

Berdasar beberapa definisi efektivitas organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan didirikannya suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan efektif dan efisien. Selain itu dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab, maka pencapaian tujuan dari organisasi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan hasil yang baik. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan.

2. Aspek-Aspek Efektivitas Organisasi

Menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53) aspek-aspek efektivitas organisasi meliputi beberapa kriteria yang mencakup :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam menentukan sebuah tujuan yang harus mengandung unsur-unsur SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timebound). Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, sebuah tujuan harus dapat dipahami atau jelas memiliki hasil yang dapat diukur, terdapat target, memiliki sumber daya yang mendukung, dan memiliki periode tertentu.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dan komunikasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Namun, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

E. FENOMENA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan aspek-aspek efektivitas organisasi dengan didasarkan pada 3 kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan untuk mengetahui hasil efektivitas pencegahan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam menangani permasalahan narkoba di wilayah Jawa Tengah. Berikut uraian lengkap fenomena yang diamati dalam penelitian :

1. Efektivitas Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Permasalahan Narkoba di Wilayah Jawa Tengah :

A. Pencapaian Tujuan

Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, sebuah tujuan harus dapat dipahami atau jelas memiliki hasil yang dapat diukur, terdapat target, memiliki sumber daya yang mendukung, dan memiliki periode tertentu.

B. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Keterlibatan organisasi lain dalam pelaksanaan serta koordinasi yang dilakukan oleh organisasi. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dan komunikasi.

C. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat

A. Letak Geografis Jateng

Jawa Tengah dibatasi 3 provinsi besar yaitu Jabar, Jatim dan DIY serta dikelilingi Samudera Hindia dan Laut Jawa.

B. Minimnya Anggaran

Anggaran yang ada saat ini masih terbatas, sementara jangkauan wilayah kerja BNNP Jateng sangatlah luas.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jangkauan kerja BNNP Jateng sangat luas mencakup satu provinsi, akan tetapi SDM yang ada saat ini masih sangat terbatas.

D. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, semisal truk cegah yang ada masih terbatas.

E. Rapat Kinerja Pemetaan Kawasan Rawan dan Sinergitas

Sejauh ini sudah berjalan cukup baik dan mendukung semua proses kegiatan pencegahan narkoba yang dijalani

F. Pelatihan Life skills bagi masyarakat rawan

a. Pelatihan Service AC di Kelurahan Kuningan Tahun 2018

b. Pelatihan Mambatik di Kelurahan Kuningan Tahun 2019

Jumlahnya kegiatan yang dilakukan masih sangat terbatas.

- G. Dibutuhkan adanya rumah Dinas Kepala BNNP Jateng dan Pegawai BNNP Jawa Tengah membutuhkan anggaran untuk pembangunan gedung karena lokasi yang sering mengalami banjir setiap musim penghujan (saat air pasang).

F. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana peneliti, berkeinginan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Tipe penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara mendalam tentang efektivitas pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan permasalahan narkoba di Jawa Tengah. dan diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas pencegahan yang dilakukan. baik itu faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Fokus penelitian ini adalah efektivitas pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan permasalahan narkoba di Jawa Tengah. sehingga lokus penelitian ini adalah di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Madukoro Blok Bb Senarang.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng, Kepala Seksi (Kasie) Pencegahan BNNP Jateng, dan Kepala Seksi (Kasie) Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng. Informan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dimana peneliti menentukan sendiri informan kunci dan informan biasa dengan alasan subjek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi bagian dari informasi.

Sumber data dalam penelitian ini, dibedakan menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data diawali dengan studi kepustakaan, guna mempertajam wawasan dan analisa, serta mendapat data-data sekunder melalui bahan-bahan, seperti laporan penelitian, buku, jurnal dan hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu dilakukan pula pengumpulan data penelitian dari lapangan dengan teknik wawancara mendalam. Dimana peneliti, mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Alur kegiatan analisis data pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

G. PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pencegahan Efektivitas Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Permasalahan Narkoba di Wilayah Jawa Tengah :

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh BNNP Jateng dalam rangka pencegahan permasalahan narkoba di Jateng cukup baik walaupun masih ada beberapa kendala yang menghadang.

Kendala yang ada diantaranya adalah kurangnya sarana prasarana (sarpras) untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Belum semua instansi dan lembaga menyadari bahwa masalah narkoba merupakan masalah bersama yang diperlukan sinergitas untuk menanganinya. Terbatasnya regulasi tentang P4GN dan belum menyeluruhnya sosialisasi P4GN kepada kabupaten kota sehingga belum bisa menganggarkan kegiatan P4GN secara mandiri.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah utamanya Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dan Pemerintah Daerah Jateng

beserta jajarannya, selain itu diperlukan adanya dukungan dari warga masyarakat jateng karena narkoba memang musuh kita bersama. Dengan langkah-langkah seperti ini, bisa dipastikan angka prevalensi narkoba di jateng bisa terkendali sampai menyentuh angka 0.05% sesuai dengan tujuan/target awal dari Bidang P2M BNNP Jateng.

2) Integrasi

Proses integrasi yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) sudah cukup baik, dimana dalam setiap proses penyuluhan maupun sosialisasi tentang narkoba BNNP Jateng selalu menggandeng pihak Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Lembaga Anti Narkoba, dan masyarakat yang peduli akan permasalahan narkoba.

Integrasi dan kerjasama seperti ini sangatlah baik dan harus terus dipertahankan, mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada pada Bidang P2M, tentu sangatlah sulit apabila mereka harus mengahandel 26 kabupaten/kota di jawa tengah yang belum ada BNNKab/Kotanya.

3) Adaptasi

Pelaksanaan pencegahan narkoba di wilayah jawa tengah erat kaitannya dengan adaptasi lingkungan yang telah dilakukan bahwa kondisi sosial budaya yang ada di jawa tengah belum terlalu mendukung terhadap usaha untuk mengantisipasi masuknya bahaya narkoba di jateng, karena perilaku masyarakatnya yang cenderung masih abu-abu dan kurang peduli terhadap masalah narkoba.

2. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Pencegahan Efektivitas Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Permasalahan Narkoba di Wilayah Jawa Tengah

A. Letak Geografis Jateng

Jawa Tengah dibatasi 3 provinsi besar yaitu Jabar, Jatim dan DIY serta dikelilingi Samudera Hindia dan Laut Jawa. Banyak pintu masuk baik dari dalam maupun luar negeri yang memungkinkan terjadinya penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah.

B. Minimnya Anggaran

Anggaran yang ada saat ini masih terbatas, sementara jangkauan wilayah kerja BNNP Jateng sangatlah luas mencakup satu provinsi. Belum lagi jumlah BNN Kabupaten dan BNNK Kota di Jateng hanya 9 saja, sementara Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jangkauan kerja BNNP Jateng sangat luas mencakup satu provinsi, akan tetapi SDM yang ada saat ini masih sangat terbatas. Jumlah pegawai yang ada saat ini sebanyak 314 orang dengan 89 orang diantaranya merupakan pegawai BNNP Jateng. Untuk jumlah pegawai ideal yang sesuai dengan DSP yang disarankan oleh BNNP Jateng mestinya berjumlah 814 orang,

Hal ini harus menjadi perhatian khusus BNNP Jateng dalam rangka pencegahan permasalahan narkoba di Jateng. Inovasi dan terobosan baru lainnya mesti dilakukan untuk menutupi kekurangan ini, semisal dengan lebih aktif baik itu di media cetak maupun media elektronik dan media social (medsos) dengan mengusung konsep obrolan ringan seputar narkoba sesuai dengan gaya anak muda agar menarik perhatian mereka, karena sekarang ini medsos menjadi kebutuhan wajib dan banyak anak muda berselanjar di dalamnya.

D. Sarana dan Prasarana

Kegiatan pencegahan narkoba di Jateng harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, hal ini bertujuan agar proses pencegahan bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan awal dari BNNP Jateng yakni menurunkan angka prevalensi narkoba hingga 0,05% di Jawa Tengah.

E. Pelatihan Life skills bagi masyarakat rawan

Harus menambah jumlah pelatihan yang ada, dan menggandeng UMKM ataupun Dinas Sosial, Dinas Pasar dan lain sebagainya, agar masyarakat narkoba bisa lepas dari ketergantungannya menjalankan bisnis narkoba entah itu sebagai bandar maupun kurir narkoba. Mereka diberi bekal keahlian dan ketrampilan agar mereka bisa berdaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

H. PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam Penanganan Permasalahan Narkoba di Wilayah Jawa Tengah sudah berjalan cukup efektif walau belum optimal. Efektivitas Bidang P2M dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut :

Pencapaian tujuan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menemui beberapa kendala yang disebabkan oleh sumber daya manusia Bidang P2M yang masih terhitung kurang dan terbatas untuk mengampu seluruh area Jawa Tengah yang begitu luas.

Peningkatkan jumlah serta kapasitas relawan dan kader anti narkoba di Jawa Tengah juga diperlukan salah satunya dengan upaya melakukan bimbingan teknis maupun diklat dan pelatihan. Peningkatkan pencegahan akan potensi masuknya narkoba di Jawa Tengah, menambah alat-alat peraga narkoba, menambah armada pencegahan seperti : penambahan jumlah truk tes urine dan

mobil cegah narkoba, Penyebaran informasi yang lebih menyeluruh dengan pemasangan baliho-baliho yang mencakup sampai daerah terpencil di pelosok jawa tengah terutama 26 daerah yang belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kotanya.

Integrasi yang bisa dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat agar tidak terjadi hambatan yang telah dijelaskan yaitu pentingnya koordinasi antar bidang agar dalam mencegah narkoba di jawa tengah dan memberdayakan masyarakat bisa secara cepat tanggap.

Melakukan kerjasama dengan bidang atau dinas yang terkait untuk membantu dalam pencegahan narkoba dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa mencegah potensi masuknya narkoba secara mandiri dan terkoordinasi.

Adaptasi yang menghambat dalam pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat di jawa tengah yaitu ketidaksesuaian keadaan maupun kondisi yang diharapkan dalam menghadapi situasi maupun kondisi yang terjadi di lingkungan dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu organisasi.

Adaptasi yang dilakukan oleh Bidang P2M sudah cukup bagus yakni dengan mengadakan rapat internal dengan mengevaluasi hasil kinerja yang telah dilakukan, dan adanya proses komunikasi yang baik, misalnya : dengan kelurahan serta masyarakat yang akan dijadikan daerah percontohan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Donoharjo, Semarang.

B. Saran

Saran yang dapat ditempuh oleh pihak terkait mengenai pelaksanaan efektivitas pencegahan narkoba oleh BNNP Jateng di jawa tengah dalam rangka mengatasi kendala-kendala efektivitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan anggaran yang ada dan sumberdaya manusia Bidang P2M dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Menambah kader/penggiat anti narkoba hingga masuk ke pelosok-pelosok desa yang terpencil.
3. Meningkatkan Proses integrasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah, begitupun juga dengan para *stakeholder* terkait.
4. Mencerdaskan masyarakat dengan menambah kerjasama dengan saluran channel televisi dan radio daerah-daerah di Jawa Tengah dengan topik pembahasan narkoba dengan gaya pembawaan yang ringan, karena yang sekarang ini jumlahnya masih sangat terbatas.
5. Lebih mengoptimalkan media sosial (medsos) dengan membicarakan topik-topik terkini mengenai narkoba, seperti misalnya di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain karena era sekarang anak-anak muda banyak menghabiskan waktunya dengan berselancar di dunia maya.

Daftar Pustaka

Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung. Cv. Pustaka Setia

Data-data dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Dhohiri Rohman Taufiq, Wartono Tarsisius, Wiratmadja Didi (2007). *Sosiologi 3 (Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat)*. Jakarta : Yudhistira

Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen* (2th.ed). Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Kusdi (2013). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.

Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta. Ar – Ruzz Media

Priassa Junni Donni, Garnida Agus (2013). *Manajemen Perkantoran (Efektif, Efisien, Profesional)*. Bandung : Alfabeta

Soetopo Hendayat (2012). *Perilaku Organisasi (Teori dan Praktek dalam Bidang Pendidikan)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset

Source: <http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/definisi-masalah-dan-jenis-jenis-dalam-penelitian.html>

Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik* . Jakarta : Rineka Cipta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi). Jakarta : Prenadamedia Group

T. Keban, Yermias. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*.

Yogyakarta: Gava Media

Uha Nawawi Ismail (2013). *Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Kinerja Proses*

Aturan Hukum

Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.